

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	tribunnews

Wilayah: Kabupaten Jepara

KPK Pantau Pengelolaan Aset Pemkab Jepara

<https://jateng.tribunnews.com/2022/09/08/kpk-pantau-pengelolaan-aset-pemkab-jepara>

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal dan memantau pengelolaan aset di Kabupaten Jepara.

Saat ini setidaknya ada tiga aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara. Tiga aset itu terdiri Stadion Kamal Djunaidi, area Pertokoan di Jobokuto, dan tanah di area objek vital PLTU.

Aset di PLTU itu kini diakui oleh salah seorang warga setempat. Pemkab Jepara kini berusaha menyelesaikan masalah aset yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang itu.

KPK dan Forkompimda Jepara meninjau langsung kondisi fisik tiga aset tersebut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kepedutian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Jauharuding, mengatakan pihaknya secara khusus datang ke Kabupaten Jepara untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Kedatangannya itu untuk menyampaikan bagaimana mengelola tata pemerintahan yang akuntabel, transparansi, dan bebas korupsi.

Ihwal aset daerah yang bermasalah, dia menyampaikan pihaknya melakukan pendampingan. Pihaknya akan melakukan identifikasi, karena bukan tidak mungkin setelah diidentifikasi ada temuan masalah-masalah lain.

Untuk masalah seperti ini, kata dia, Pemkab Jepara harus mengamankan dulu aset-aset miliknya.

Pemkab Jepara harus menguasai aset secara legal formal. Artinya, Pemkab Jepara memiliki sertifikat aset dan sertifikat itu atas nama Pemkab Jepara. Dia mendorong Pemkab Jepara menyertifikasi asetnya.

Menurutnya, aset-aset yang tidak bersertifikat akan menimbulkan masalah.

Pengelolaan aset secara baik, kata dia, bisa mencegah korupsi. Satu di antaranya pengelolaan yang baik, yakni perbaikan sistem celah-celah yang bisa dijadikan korupsi.

"Yang bisa dikorupsi tidak hanya uang, tetapi aset pun, tanah juga dikorupsi," kata Uding kepada tribunmuria.com, Kamis, 8 September 2022.

Lebih lanjut, ujarnya, korupsi tanah biasa dilakukan dengan mengalihkan nama pemilik tanah. Untuk, pihaknya mengajak kepada jajaran untuk berkontribusi buat menjaga aset Jepara.

Menurutnya, setelah ada persamaan persepsi untuk penyelesaian permasalahan ini. Masyarakat akan merasa dampaknya.

Uding mengungkapkan bentuk pendampingan kepada Pemkab Jepara ini, pihaknya akan mengidentifikasi masalah. Setelah itu, KPK akan memberikan saran kepada pihak-pihak terkait.

"Kita terus mengawal dan memantau. Ketika arah-arah sudah penyimpangan. Kami nanti juga bukan tidak mungkin kami masuk dari sisi penindakannya," ucap Uding, menambahkan.

Namun, dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan pencegahan. Karena penindakan bukan target dari korupsi. Menurutnya, penindakan itu melelahkan karena melewati banyak proses. Apalagi ini untuk kepentingan negara.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk menyelamatkan aset-aset Pemkab.

Pada hari ini, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas yang terletak di area PLTU. Dia belum bisa membeberkan akar masalah aset Pemkab Jepara di obyek wisata itu.

"Ikuti saja perkembangannya," tandasnya. (*)